

**ANALISIS PERSEPSI PELAJAR DAN MASYARAKAT TERHADAP
JEMBATAN RUSAK SEBAGAI INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
PENDIDIKAN DAN DAMPAKNYA BAGI PELAYANAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN TANGGAMUS**

TUGAS INDIVIDU

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Metode Penelitian Administrasi Publik**

Dosen Pengampu:

Prof. Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D.



Oleh:

Maudy Aprilica B 2416041130

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Konsep Presepsi.....	12
2.1.2 Konsep Insfrastuktur.....	14
2.1.3 Insfratraktur Pendidikan	15
2.1.4 Pelayanan Publik.....	16
2.1.5 Penelitian Terdahulu.....	18
2.2 Kerangka Konseptual	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Tipe dan Jenis Penelitian.....	22
3.2 Fokus Penelitian	23
3.3 Lokasi Penelitian.....	24
3.4 Sumber Data Penelitian.....	25
3.4.1 Data Primer	25
3.4.2 Data Skunder.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5.1 Wawancara.....	26
3.5.2 Observasi	27
3.6 Teknik Analisis Data.....	28
3.6.1 Reduksi Data (Data Reduction)	28
3.6.2 Penyajian Data (Data Display / Data Presentation)	29
3.6.3 Verifikasi / Validasi Data / Triangulasi	29
3.6.4 Penarikan Kesimpulan & Interpretasi.....	29
3.7 Teknik Keabsahan Data	30
3.7.1 Kredibilitas (Credibility).....	30
3.7.2 Transferabilitas, Dependabilitas & Konfirmabilitas	30

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia, sehingga negara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya sekadar kebutuhan individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta memastikan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat (Nurbaya et al., 2024). Sebagaimana dijelaskan oleh penelitian dari Palguna & Dwi Atmaja (2023), bahwa negara harus secara aktif menerapkan kebijakan publik yang mendorong terpenuhinya hak atas pendidikan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan kemajuan peradaban umat manusia.

Pemerataan pelayanan publik dalam sektor pendidikan merupakan landasan penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang merata (Mahardhani, 2025). Ketimpangan akses pendidikan di Indonesia masih terjadi, terutama karena keterbatasan infrastruktur pendidikan dan distribusi guru yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran serta kesempatan belajar siswa dari komunitas yang kurang beruntung (Afendi et al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran diperlukan agar layanan pendidikan dapat diakses secara adil oleh seluruh warga negara

Pentingnya infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, hingga infrastruktur pendukung lain seperti jalan ataupun jembatan penyebrangan menuju sekolah yang aman dan layak, memiliki peranan penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar (Juro et al., 2025). Sarana fisik yang memadai dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, mendorong semangat peserta didik, dan mendukung efektivitas

pembelajaran. Ketersediaan infrastruktur yang baik juga berpengaruh pada motivasi, ketekunan, serta prestasi akademik peserta didik

Namun pada kenyataannya, infrastruktur pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Ketimpangan akses pendidikan masih terlihat jelas, misalnya kondisi gedung sekolah yang tidak layak, keterbatasan ruang kelas, serta akses jalan dan jembatan yang rusak sehingga menyulitkan peserta didik menuju sekolah. Hambatan tersebut tidak hanya mengurangi kenyamanan belajar, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kehadiran, motivasi, bahkan capaian akademik siswa. Kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan sarana prasarana, sehingga tanpa dukungan infrastruktur yang memadai tujuan pemerataan pendidikan sulit untuk diwujudkan (Fadillah et al., 2025). Situasi ini menunjukkan pentingnya perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata agar seluruh anak bangsa dapat memperoleh hak pendidikan secara adil.

Akses ke sekolah di daerah pedesaan di Indonesia masih kerap terkendala oleh kondisi jembatan yang rusak atau tidak layak digunakan. Keberadaan jembatan yang aman dan memadai sangat penting karena menjadi jalur utama mobilitas siswa menuju sekolah. Kerusakan jembatan tidak hanya menimbulkan risiko keselamatan, tetapi juga berdampak pada tingkat kehadiran siswa serta mengurangi kelancaran proses belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur jembatan memiliki peran vital dalam mendukung pemerataan layanan pendidikan dan memastikan terpenuhinya hak belajar bagi seluruh warga negara

Salah satu persoalan yang sering dihadapi peserta didik di wilayah pedesaan adalah kondisi jembatan yang rusak atau tidak layak digunakan. Jembatan memiliki fungsi sebagai penghubung akses menuju sekolah, sehingga kerusakannya tidak hanya menimbulkan risiko keselamatan, tetapi juga menghambat mobilitas siswa. Dampak yang muncul antara lain keterlambatan,

penurunan kehadiran, hingga berkurangnya konsentrasi belajar karena rasa cemas melewati jalur berbahaya (Rosyidah et al., 2024). Fakta ini menegaskan bahwa keberadaan jembatan yang memadai merupakan bagian penting dari infrastruktur pendidikan yang harus diperhatikan negara untuk menjamin pemerataan layanan pendidikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur, khususnya jembatan sebagai sarana penunjang pendidikan, memiliki hubungan erat dengan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Infrastruktur yang memadai bukan hanya mempermudah akses siswa menuju sekolah, tetapi juga menjadi indikator terpenuhinya hak masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang aman, layak, dan merata. Sebaliknya, jika infrastruktur pendukung dibiarkan rusak, maka kualitas layanan publik pendidikan akan menurun karena akses belajar menjadi terbatas, risiko keselamatan meningkat, dan hak peserta didik atas pendidikan yang setara tidak terpenuhi.

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung dengan luas wilayah sekitar 4.654,98 km², yang terdiri dari 2.855,46 km² daratan dan 1.799,5 km² perairan laut. Secara geografis, wilayah ini berada pada koordinat 104°18'–105°12' BT dan 5°05'–5°56' LS dengan kondisi topografi beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan dengan elevasi mencapai 2.115 meter di atas permukaan laut. Tanggamus juga memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 200 km di Teluk Semangka (Data BPS Kabupaten Tanggamus 2020). Karakter geografis ini membuat banyak desa berada di daerah terpencil dengan akses mobilitas yang terbatas, sehingga jembatan menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan masyarakat dalam beraktivitas, termasuk siswa yang harus menempuh perjalanan menuju sekolah.

Jembatan dalam pelayanan pendidikan di daerah pedesaan Tanggamus berperan lebih dari sekadar sarana transportasi. Keberadaannya menjadi jalur utama bagi siswa untuk bersekolah, sekaligus menjadi penentu kelancaran

aktivitas belajar mengajar. Infrastruktur jembatan yang aman dapat mendukung kelancaran pelayanan publik pendidikan karena siswa dapat berangkat sekolah tepat waktu dan tanpa rasa cemas. Namun, ketika jembatan dalam kondisi rusak atau tidak layak, dampaknya langsung terasa bagi pendidikan di daerah tersebut. Hal ini memperlihatkan keterkaitan erat antara kualitas infrastruktur dengan terpenuhinya hak masyarakat terhadap layanan pendidikan yang setara dan aman.

Kenyataan tersebut semakin diperkuat dengan adanya dalam kasus jembatan rusak di Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, yang sempat viral di media sosial. Video yang tersebar menunjukkan pelajar SMP harus menyeberangi jembatan dengan kondisi sangat berbahaya: papan kayu lapuk hilang, rangka jembatan berkarat, dan siswa hanya berpijak pada sling besi untuk sampai ke sekolah. Fenomena ini mencerminkan bagaimana kerusakan infrastruktur dapat menghambat pemerataan pendidikan sekaligus membahayakan keselamatan anak-anak. Publik menilai kasus ini sebagai cermin lemahnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan sarana pendidikan yang layak. Meskipun akhirnya pemerintah daerah dan provinsi segera merespons dengan rencana pembangunan jembatan darurat, kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat di wilayah terpencil.

Permasalahan utama yang muncul akibat kerusakan jembatan di Kabupaten Tanggamus adalah meningkatnya risiko keselamatan bagi peserta didik. Kondisi jembatan yang rapuh, berlubang, serta hanya ditopang tali sling besi menimbulkan potensi bahaya serius yang dapat mengancam jiwa. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketakutan dan kecemasan setiap kali menyeberang, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis peserta didik yang pada akhirnya dapat memengaruhi konsentrasi dan kesiapan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh sebab itu, persoalan infrastruktur yang rusak memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan pendidikan.

Kerusakan jembatan juga memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan pendidikan. Hambatan akses membuat peserta didik sering kali terlambat masuk sekolah, bahkan tidak jarang absen terutama pada saat musim hujan atau kondisi jembatan semakin memburuk. Tingginya tingkat keterlambatan dan absensi berpotensi menurunkan motivasi belajar, mengurangi efektivitas pembelajaran, serta memengaruhi capaian akademik. Jika dibiarkan berlarut, permasalahan ini dapat meningkatkan kemungkinan peserta didik putus sekolah karena kesulitan akses menuju lembaga pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana prasarana pendukung yang memadai.

Permasalahan ini turut menjadi persoalan bagaimana persepsi masyarakat dan peserta didik terhadap peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik di bidang pendidikan. Lambannya penanganan terhadap kasus jembatan rusak menimbulkan penilaian bahwa pemerintah belum memberikan perhatian yang optimal terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses pendidikan yang aman dan layak. Bagi peserta didik, kondisi ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah yang seharusnya menjamin hak konstitusional mereka. Persepsi negatif ini penting untuk diperhatikan karena tingkat kepercayaan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, permasalahan jembatan rusak tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan psikologis yang berimplikasi luas terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Pelayanan publik memiliki fungsi penting dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat, termasuk hak atas pendidikan yang aman, layak, dan merata (Haryati et al., 2024). Penyediaan infrastruktur pendukung berupa jalan dan jembatan menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut karena berperan langsung dalam kelancaran akses peserta didik menuju sekolah. Kebijakan pemerintah telah menekankan peningkatan mutu serta pemerataan layanan pendidikan, namun realisasinya sangat bergantung pada ketersediaan sarana

fisik yang memadai. Ketika akses dasar berupa jembatan masih dalam kondisi rusak, maka janji pemerataan pendidikan berpotensi tidak tercapai dan hanya berhenti pada tataran kebijakan .

Kondisi di Kabupaten Tanggamus memperlihatkan kesenjangan nyata antara komitmen pemerintah dengan situasi yang dialami masyarakat. Jembatan yang rusak dan dibiarkan tanpa perbaikan menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan pendidikan di daerah terpencil. Keadaan ini menimbulkan ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang aman dengan kondisi infrastruktur yang tersedia. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemerataan dan keadilan, sehingga penyelenggaraan pendidikan masih menghadapi hambatan serius terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil.

Penelitian tentang persepsi pelajar dan masyarakat adalah hal yang penting untuk dilakukan dalam permasalahan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tanggamus. Suara dari pihak yang secara langsung terdampak, baik peserta didik maupun masyarakat sekitar, dapat memberikan gambaran yang lebih nyata tentang bagaimana kondisi jembatan rusak memengaruhi akses serta kualitas pendidikan. Penelitian semacam ini tidak hanya memperlihatkan aspek fisik infrastruktur, melainkan juga menggali dimensi sosial, psikologis, dan kultural yang dialami masyarakat dalam menghadapi keterbatasan pelayanan publik. Dengan demikian, analisis persepsi menjadi sarana untuk memastikan bahwa pengalaman masyarakat tidak terabaikan dalam evaluasi kebijakan publik.

Hasil penelitian mengenai persepsi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah strategis yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Data yang diperoleh dapat berfungsi sebagai masukan konkret bagi perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan, sehingga penyediaan layanan publik tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan

riil di lapangan. Keberadaan penelitian ini juga berperan dalam mendorong pemerintah untuk memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan dalam pelayanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang selama ini masih menghadapi hambatan serius akibat keterbatasan infrastruktur dasar.

Secara teoritis, infrastruktur pendidikan yang memadai diyakini sebagai prasyarat penting dalam menjamin akses dan pemerataan pendidikan, sebab sarana fisik menjadi faktor pendukung utama keberlangsungan proses belajar. Secara empiris, Kerusakan atau keterbatasan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan di daerah pedesaan, berdampak signifikan terhadap keterlambatan, absensi, bahkan risiko putus sekolah bagi peserta didik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan publik di bidang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas infrastruktur yang ada, karena persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah banyak ditentukan oleh sejauh mana kebutuhan dasar mereka difasilitasi (Said, 2022). Berdasarkan hal tersebut, penelitian tentang persepsi pelajar dan masyarakat terhadap infrastruktur menjadi penting untuk memahami keterkaitan antara aspek fisik dan penerimaan sosial dalam penyelenggaraan pelayanan publik pendidikan.

Berdasarkan landasan teoritis dan empiris tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap paling tepat untuk menggali lebih jauh persepsi pelajar dan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur pendidikan. Melalui kualitatif, peneliti dapat menangkap pengalaman subjektif, pandangan, serta makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap keberadaan jembatan sebagai sarana penunjang akses sekolah. Pendekatan ini juga memungkinkan diperolehnya data yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai bagaimana hambatan infrastruktur berimplikasi pada pelayanan publik pendidikan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu merefleksikan realitas sosial yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Tanggamus.

Penelitian terdahulu banyak membahas hubungan infrastruktur dengan pendidikan, namun kajian yang secara khusus menempatkan jembatan rusak sebagai bagian dari pelayanan publik pendidikan masih sangat terbatas. Suharta (2021), menemukan bahwa keterbatasan pembangunan jalan di wilayah terpencil berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah, karena peserta didik kesulitan menjangkau lembaga pendidikan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada rendahnya angka partisipasi sekolah, tetapi juga memperbesar kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan akses jalan yang layak merupakan faktor penentu keberlangsungan pendidikan, sekaligus menjadi indikator penting dalam mewujudkan pemerataan layanan publik di bidang pendidikan.

Penelitian dari Susanti & Sabardila (2023), yang dilakukan di Desa Tlobo dan Karangsari juga memperlihatkan bahwa pembangunan jalan dan jembatan memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, meskipun fokusnya belum diarahkan pada aspek pendidikan secara khusus. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang bagi penelitian ini, yakni untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana kondisi jembatan, khususnya ketika mengalami kerusakan, memengaruhi persepsi masyarakat dan pelajar terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan di Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis persepsi pelajar dan masyarakat mengenai keberadaan jembatan rusak sebagai bagian dari infrastruktur pendukung pendidikan. Dengan judul *“Analisis Persepsi Pelajar dan Masyarakat Terhadap Jembatan Rusak Sebagai Infrastruktur Pendukung Pendidikan dan Dampaknya Bagi Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Tanggamus”* Fokus ini dipilih untuk melihat sejauh mana kondisi jembatan memengaruhi aksesibilitas siswa menuju sekolah serta bagaimana situasi tersebut berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini juga berupaya menggali pandangan masyarakat mengenai peran pemerintah dalam menanggapi persoalan infrastruktur yang rusak, mengidentifikasi hambatan yang dirasakan secara langsung oleh pelajar, serta menelaah konsekuensi sosial dan psikologis yang muncul akibat keterbatasan akses tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang mengenai keterkaitan antara kondisi infrastruktur, pengalaman masyarakat, dan mutu pelayanan pendidikan, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena empiris dan kajian teoritis yang telah dijelaskan, kerusakan jembatan di Kabupaten Tanggamus tidak hanya mengancam keselamatan pelajar, tetapi juga berdampak pada aksesibilitas pendidikan serta membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen pemerintah dalam pemerataan pendidikan dengan realitas infrastruktur di lapangan. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi pelajar dan masyarakat terhadap kondisi jembatan rusak sebagai infrastruktur pendukung pendidikan di Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana dampak kondisi jembatan rusak tersebut terhadap kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Tanggamus?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami persepsi pelajar dan masyarakat terhadap jembatan rusak di Kabupaten Tanggamus serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan pendidikan seperti akses, keselamatan, dan kelancaran proses belajar mengajar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Manfaat yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang hubungan antara infrastruktur pendukung pendidikan, khususnya jembatan, dengan kualitas pelayanan pendidikan di daerah pedesaan. Jawaban atas rumusan masalah akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori administrasi publik, terutama dalam melihat keterkaitan antara penyediaan sarana prasarana dasar dengan persepsi masyarakat serta dampaknya terhadap pemerataan pendidikan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas aspek sosial, psikologis, dan kebijakan publik terkait pendidikan di daerah terpencil.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus serta pihak terkait lainnya dalam upaya memperbaiki dan membangun infrastruktur pendukung pendidikan, terutama jembatan yang menjadi jalur utama pelajar menuju sekolah. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendorong percepatan pembangunan sarana transportasi yang aman, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan organisasi sosial dalam menyuarakan aspirasi terkait pentingnya infrastruktur pendidikan yang layak demi keberlangsungan proses belajar mengajar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Presepsi

Persepsi menurut Stephen P. Robbins dalam; (Irawan, 2018) didefinisikan sebagai suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka guna memberikan makna atas lingkungannya. Seseorang tidak hanya secara pasif menerima rangsang inderawi, tetapi juga memilih, mengelompokkan, dan menginterpretasikan rangsangan tersebut agar menjadi suatu gambaran yang bermakna. Persepsi ini bisa berbeda antara satu orang dan lainnya meskipun rangsang yang diterima sama, karena adanya perbedaan pengalaman, latar belakang, dan sistem interpretasi individu.

Bimo Walgito dalam; (Irawan, 2018) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses yang dimulai dari penginderaan. Menurut Walgito, stimulus yang masuk melalui alat indera (sensoris) kemudian diproses lebih lanjut melalui tahapan organisasional dan interpretatif hingga menjadi suatu makna dalam pikiran individu. Dengan demikian, persepsi tidak berhenti pada penerimaan stimulus, melainkan melibatkan proses internal dalam diri individu untuk memahami dan mengkategorikan stimulus tersebut.

Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam; (Irawan, 2018), persepsi adalah pengalaman atas objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh melalui proses menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan yang ada. Rakhmat berasumsi bahwa persepsi adalah aktivitas intelektual di mana manusia mengolah data sensoris menjadi makna melalui inferensi dan interpretasi berdasarkan konteks, pengalaman, serta kerangka pikir masing-masing individu. Presepsi bukan semata reaksi mekanis terhadap stimulus, tetapi juga proses aktif yang menyertakan unsur subjektivitas dalam memberikan makna terhadap lingkungan.

Persepsi dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan, antara lain pengalaman, lingkungan, dan motivasi. Pengalaman sebelumnya sangat menentukan bagaimana seseorang memandang rangsangan baru; orang yang pernah merasakan situasi serupa akan lebih cepat menginterpretasi stimulus berdasarkan memori dan harapan yang terbentuk dari pengalaman tersebut. Motivasi, dukungan sosial, dan kesadaran diri (self-awareness) memediasi persepsi remaja terhadap aktivitas fisik, di mana pengalaman emosional dan sosial membentuk cara pandang mereka terhadap manfaat dan hambatan aktivitas tersebut (Shodiyevich, 2025).

Lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya berperan besar. Lingkungan sosial seperti teman sebaya atau rekan belajar dapat mempengaruhi persepsi dalam pendidikan. Motivasi internal (kebutuhan, tujuan pribadi, harapan) juga membentuk persepsi dengan kuat; individu yang bermotivasi tinggi akan lebih aktif mencari, memilih, dan memberi penafsiran terhadap stimulus agar sesuai dengan tujuan mereka, serta mungkin lebih sensitif terhadap kualitas atau kekurangan lingkungan. Faktor-motivasi ini memungkinkan seseorang untuk lebih memperhatikan detail, membandingkan stimulus dengan standar atau harapan yang dimiliki, dan akhirnya memengaruhi persepsi keseluruhan (Pringgoutami et al., 2019).

Persepsi memiliki peran dalam penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik karena ia menjadi penghubung antara pengalaman individu dan harapan terhadap pelayanan tersebut. Ketika warga menggunakan layanan publik misalnya pelayanan pendidikan, kesehatan, atau administrasi—yang mereka nilai bukan hanya aspek teknisnya (kesediaan fasilitas, kelengkapan sarana, Norma/aturan), tapi juga bagaimana mereka merasakan pelayanan itu dalam praktik: kecepatan, keramahan petugas, kejelasan prosedur, kemudahan akses, serta keandalan layanan. Untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik

secara efektif, penting membandingkan persepsi pengguna terhadap layanan yang diterima dengan harapan mereka. Perbedaan (gap) antara persepsi dan harapan ini sering menjadi indikator utama kepuasan pengguna terhadap layanan publik (Menezes et al., 2022).

2.1.2 Konsep Insfrastuktur

Infrastruktur secara umum merupakan semua fasilitas dasar yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, transportasi, sanitasi dan pelayanan-pelayanan publik lainnya, yang bertujuan memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana umum (public capital) yang dibentuk atas investasi pemerintah, mencakup jalan, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan fasilitas serupa lainnya yang menjadi penghubung sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam administrasi publik dan pembangunan, definisi ini menekankan bahwa infrastruktur bukan hanya tentang aspek fisik semata tetapi juga terkait dengan kapasitas negara/daerah dalam menyediakan pelayanan publik, distribusi sumber daya, menjaga mobilitas, serta memperkecil ketimpangan antar wilayah (Pringgoutami et al., 2019).

Jenis-jenis infrastruktur bisa dikategorikan ke dalam beberapa kelompok tergantung fungsinya: ada infrastruktur fisik keras (hard infrastructure) seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, bandara; ada juga infrastruktur non-fisik yang mendukung seperti pasokan listrik, air bersih, sistem penyediaan komunikasi dan sistem pengelolaan limbah. Infrastruktur sosial khususnya meliputi fasilitas yang secara langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan (sekolah, perpustakaan), fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit), pusat kegiatan masyarakat, sarana olahraga dan budaya. Infrastruktur pendidikan sebagai bagian dari infrastruktur sosial mempunyai peran

ganda: satu sisi sebagai fisik (bangunan sekolah, laboratorium, akses jalan ke sekolah) dan sisi lain sebagai pendukung operasional (lingkungan belajar yang sehat, aksesibilitas, transportasi siswa). Dengan demikian, infrastruktur pendidikan tidak hanya tentang adanya bangunan, tetapi juga keberlanjutan fasilitas pendukung agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif (Wulandari & Tulis, 2022).

Infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan berperan dalam mobilitas masyarakat, karena mereka menjadi penghubung antar wilayah yang memungkinkan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, pasar, dan aktivitas sosial lainnya. Jalan dan jembatan yang baik memungkinkan siswa di wilayah pedesaan atau terpencil dapat pergi ke sekolah dengan waktu tempuh yang lebih pendek, risiko yang lebih sedikit (misal saat musim hujan atau banjir), serta biaya transportasi yang lebih rendah, sehingga meningkatkan kehadiran serta akses ke pendidikan. Dampak tak langsungnya juga mempercepat penyebaran barang, jasa, dan informasi, yang pada akhirnya mendukung pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat (Mastuti et al., 2021).

2.1.3 Insfratraktur Pendidikan

Infrastruktur pendidikan mencakup semua sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik yang menjadi pendukung proses belajar-mengajar dan lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Komponen fisiknya meliputi bangunan sekolah (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru), fasilitas sanitasi, akses jalan dan transportasi ke sekolah, serta fasilitas pendukung seperti sarana olahraga dan teknologi pendidikan. Komponen non-fisik antara lain ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten, kurikulum, sistem manajemen sekolah, teknologi pembelajaran (seperti proyektor, komputer), dan kebijakan pemeliharaan fasilitas (Khoirunisa & Lestari, 2025).

Sarana dan prasarana pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indikator kualitas pendidikan seperti ketepatan waktu belajar (keterlambatan siswa), tingkat kehadiran (absensi), dan prestasi akademik. Fasilitas yang baik ruang kelas yang nyaman, pencahayaan dan ventilasi memadai, akses transportasi yang aman dapat mengurangi hambatan fisik dan psikologis siswa sehingga mereka lebih termotivasi untuk datang tepat waktu dan rajin hadir. Elemen seperti kebersihan, ventilasi, dan pencahayaan sangat memengaruhi konsentrasi siswa dan akhirnya prestasi mereka. Motivasi dan fasilitas fisik sekolah bersamasarana belajar mempengaruhi hasil belajar siswa. Ketersediaan sarana-prasarana pendidikan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap prestasi akademik siswa. Pendidikan di Indonesia memandang bahwa infrastruktur transportasi yang baik turut mengurangi ketimpangan pendidikan antar wilayah, yang secara tidak langsung memperbaiki akses siswa ke sekolah dan memungkinkan distribusi layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas (Rahma & Kartiasih, 2024).

2.1.4 Pelayanan Publik

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ini bertujuan agar ada kepastian hukum, jelasnya hak, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang pihak-pihak terkait, sehingga warga negara terlindungi dalam mengakses pelayanan yang menjadi haknya. Dalam pendidikan, definisi ini berarti bahwa warga siswa, orang tua, dan masyarakat mempunyai hak mendapatkan layanan pendidikan yang disediakan oleh instansi terkait (pemerintah daerah / pusat), baik berupa fasilitas pendidikan, tenaga pengajar, sarana pendukung, maupun administratif seperti

pendaftaran atau layanan sertifikasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No. 25 Tahun 2009 juga mengatur asas-asas umum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar pelayanan tersebut berkualitas. Antaranya adalah akuntabilitas, keadilan, partisipasi, dan efektivitas (serta efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum). Akuntabilitas berarti penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik dan lembaga pengawas. Keadilan menuntut bahwa pelayanan diberikan tanpa diskriminasi, dan semua warga negara mempunyai akses layanan yang sama sesuai haknya. Partisipasi mengandung makna bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan, sehingga kebutuhan lokal dapat diakomodasi. Efektivitas terutama menunjukkan bahwa pelayanan publik harus mencapai tujuan pelayanan tersebut: memberikan manfaat nyata, meminimalkan hambatan, tepat waktu, dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Masih ada kelemahan dalam pelaksanaan akuntabilitas publik di pemerintahan daerah, terutama terkait manajemen keuangan, respons institusi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu dalam kenyataannya pelayanan publik modern (termasuk pendidikan), efektivitas dan keadilan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah daerah mendistribusikan fasilitas pendidikan dan bagaimana layanan administratif pendidikan berjalan (misal: pendaftaran, administrasi sekolah) sehingga warga tidak mengalami hambatan prosedural atau geografis (Rizal, 2025).

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kewenangan pemerintah daerah dalam sektor pendidikan diperkuat oleh otonomi daerah, yang memberi ruang bagi daerah untuk merencanakan, membiayai, mengelola dan mengawasi pendidikan sesuai kebutuhan daerahnya. Meskipun pemerintah kabupaten memiliki kewenangan, realisasi peranannya tetap

lemah; distribusi guru dan dana pendidikan belum merata, pengawasan masih kurang, dan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan masih rendah. Otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggaran pendidikan secara mandiri dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, tetapi tantangan seperti ketimpangan akses antar wilayah, keterbatasan sumber daya manusia dan fisik tetap menjadi penghambat utama. Pemerintah daerah juga berperan dalam penyediaan infrastruktur fisik sebagai bagian dari tanggung jawabnya: membangun / memelihara sekolah, menyediakan akses jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas siswa, memastikan fasilitas pendukung (seperti air bersih, listrik, sarana sanitasi), dan fasilitas teknis lainnya. Tanpa dukungan infrastruktur ini, pelayanan pendidikan publik tidak akan efektif karena hambatan fisik dan administratif akan muncul, seperti siswa sulit mencapai sekolah, fasilitas rusak atau tidak memadai yang mengganggu proses belajar-mengajar, dan pelayanan administratif yang lambat atau tidak bisa dijangkau (Saprianto et al., 2023).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

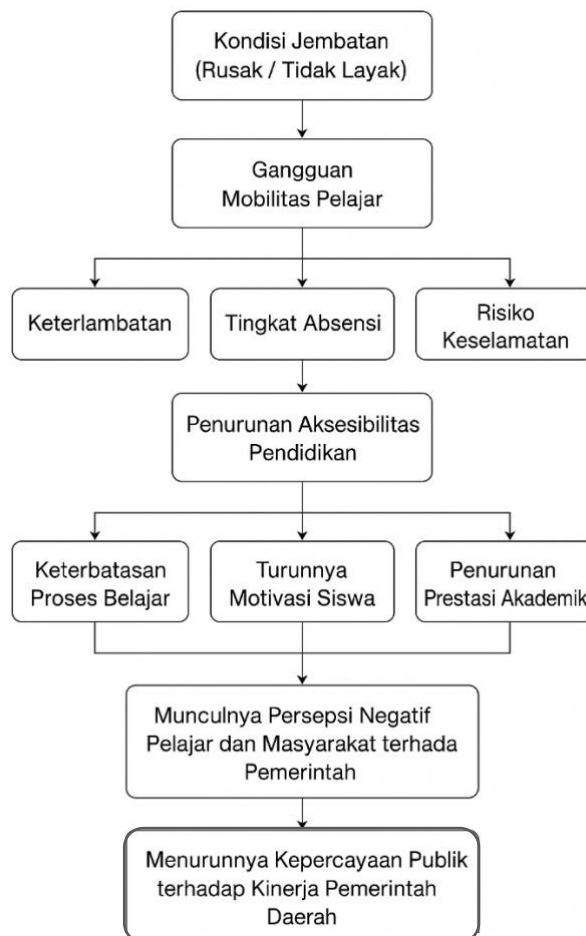
Beberapa penelitian mengeksplorasi pengaruh kondisi jalan terhadap motivasi atau kehadiran siswa. Misalnya, penelitian *The Impact of Road Infrastructure in Pengkadan Baru Village on Students' School Interest in SMA Negeri 1 Kelam Permai* menemukan bahwa kondisi jalan yang sangat rusak di desa Pengkadan Baru memengaruhi minat siswa untuk pergi ke sekolah: jalan yang parah menjadi penghambat fisik dan psikologis sehingga motivasi kehadiran sekolah siswa menjadi rendah (Pangestu et al., 2025).

Penelitian *Road Infrastructure Inequality and Dropout Rates in Isolated Areas* mengkaji ketidakmerataan infrastruktur jalan di wilayah terpencil dan bagaimana hal itu berhubungan dengan tingkat putus sekolah (dropout). Penelitian ini menunjukkan bahwa akses jalan yang buruk membuat siswa dan guru sulit menjangkau sekolah, serta menyulitkan

distribusi fasilitas dan sumber daya pendidikan sehingga berkontribusi terhadap putus sekolah yang lebih tinggi di daerah-daerah tersebut (Suharta, 2021).

Beberapa penelitian telah meneliti persepsi masyarakat terhadap pembangunan dan fungsi jembatan sebagai bagian dari infrastruktur transportasi. Salah satunya adalah studi Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Sei Bingei yang mengevaluasi bagaimana masyarakat menilai pembangunan jembatan di Desa Sei Bingei, Kabupaten Binjai. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun jembatan dianggap sebagai fasilitas penting, fungsi jembatan tidak optimal karena infrastruktur transportasi pendukungnya belum memadai menurut persepsi masyarakat (Sitepu et al., 2020).

2.2 Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Secara konseptual, kerusakan jembatan sebagai infrastruktur dasar pendidikan menjadi faktor awal yang memengaruhi aksesibilitas pelajar menuju sekolah. Jembatan yang rusak menimbulkan hambatan mobilitas, meningkatkan risiko keselamatan, dan mengakibatkan keterlambatan serta absensi siswa. Akses yang terganggu kemudian berdampak pada penurunan efektivitas pelayanan publik di bidang pendidikan, karena layanan belajar mengajar tidak dapat berjalan optimal. Kondisi ini juga menurunkan kualitas lingkungan belajar serta motivasi siswa, yang berujung pada penurunan prestasi akademik.

Selain berdampak pada pendidikan, permasalahan infrastruktur tersebut turut memengaruhi persepsi masyarakat dan pelajar terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat menilai bahwa lambannya perbaikan jembatan dan kurangnya perhatian terhadap sarana pendukung pendidikan mencerminkan rendahnya akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang adil. Persepsi ini dipengaruhi pula oleh faktor sosial dan psikologis seperti pengalaman langsung masyarakat, informasi dari media, dan partisipasi publik dalam menuntut perbaikan. Dengan demikian, hubungan antar konsep dalam penelitian ini membentuk rantai keterkaitan antara aspek fisik (infrastruktur), aspek fungsional (pelayanan publik pendidikan), dan aspek sosial-psikologis (persepsi masyarakat).

Secara konseptual, alur di atas menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan yang rusak tidak hanya berdampak pada aspek fisik seperti keterlambatan siswa, tetapi juga merembet pada aspek sosial (kepercayaan publik), psikologis (motivasi belajar), dan administratif (pelayanan publik). Penelitian ini akan menggali persepsi dan pengalaman masyarakat serta pelajar untuk memahami secara mendalam bagaimana kerusakan jembatan

di Kabupaten Tanggamus membentuk pandangan mereka terhadap efektivitas pelayanan pendidikan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berpijak pada teori-pelayanan publik, teori pembangunan infrastruktur pendidikan, dan konsep aksesibilitas pendidikan. Teori pelayanan publik menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan yang adil, merata, dan berkualitas kepada seluruh masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketika infrastruktur seperti jembatan yang menjadi bagian dari sarana pendidikan rusak atau tidak memadai, maka prinsip keadilan dan aksesibilitas akan terganggu, karena siswa dan masyarakat di daerah terpencil menghadapi hambatan fisik yang membuat akses ke sekolah menjadi sulit.

Teori pembangunan pendidikan mengatakan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tenaga pengajar dan kurikulum, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana fisik serta dukungan lingkungan belajar. Berdasarkan fenomena di lapangan di Kabupaten Tanggamus (hasil pengamatan awal, data sekunder, dan rujukan kebijakan daerah), banyak sekolah yang aksesnya terhambat karena jembatan penghubung rusak sehingga siswa mengalami keterlambatan, absensi meningkat, dan risiko keselamatan yang tinggi. Hambatan fisik ini berdampak terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pendidikan: proses belajar mengajar menjadi terganggu, kualitas layanan (sarana/lingkungan belajar, kenyamanan, keselamatan) menjadi kurang optimal. Kondisi ini akan membentuk persepsi negatif dari pelajar dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah: apakah pemerintah dianggap responsif, adil, dan akuntabel dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai. Dengan logika tersebut, penelitian ini mengambil fokus pada persepsi pelajar dan masyarakat terhadap kondisi jembatan rusak sebagai infrastruktur pendukung pendidikan, aksesibilitas pendidikan, dan kualitas pelayanan pendidikan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian melalui data berupa kata-kata, narasi, atau dokumen, bukan angka atau statistik (Syahrizal & Jailani, 2023). Penelitian kualitatif deskriptif dipakai untuk menjelaskan fenomena secara alamiah sebagaimana adanya, dengan memusatkan perhatian pada konteks dan makna yang muncul dari partisipan (Abdussamad, 2021). Berdasarkan penelitian ini, pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pelajar dan masyarakat di Kabupaten Tanggamus memaknai kondisi jembatan yang rusak sebagai bagian dari infrastruktur pendidikan dan bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan belajar mereka. Metode ini juga dipandang tepat karena fokus penelitian adalah mengungkap persepsi, pengalaman, dan pandangan individu maupun kelompok yang terdampak, bukan mengukur hubungan antar-variabel secara statistik.

Alasan dipilihnya penelitian kualitatif deskriptif ini adalah karena persoalan yang diangkat bersifat kontekstual dan subjektif, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif tepat digunakan ketika penelitian ingin memberikan deskripsi menyeluruh tentang suatu fenomena dari sudut pandang partisipan secara nyata. Hal ini relevan karena persepsi masyarakat dan pelajar terhadap infrastruktur yang rusak tidak bisa diukur hanya dengan angka, tetapi perlu dipahami melalui cerita, pandangan, dan pengalaman yang mereka alami sehari-hari (Agus et al., 2024). Selain itu, penelitian mengenai dampak jembatan rusak terhadap akses pendidikan di daerah pedesaan masih jarang dilakukan, sehingga studi kualitatif dapat mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dan memberikan masukan yang lebih kontekstual bagi kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya menggambarkan fakta kondisi infrastruktur, tetapi juga mengungkap

konsekuensi sosial, psikologis, dan pelayanan publik yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada persepsi pelajar dan masyarakat terhadap dampak kerusakan jembatan sebagai infrastruktur pendidikan, khususnya terkait akses fisik ke sekolah, keselamatan dalam perjalanan, dan konsekuensi terhadap kualitas pembelajaran. Penelitian akan memusatkan perhatian pada bagaimana pelajar mengalami hambatan dalam mobilitas, bagaimana orang tua dan masyarakat memandang risiko dan keandalan infrastruktur jembatan, serta bagaimana kondisi ini memengaruhi motivasi belajar dan pelayanan pendidikan di sekolah-terdekat. Fokus juga mencakup tanggapan terhadap tanggung jawab pemerintah atau pihak terkait, serta harapan terhadap solusi yang mungkin diterapkan di wilayah Kabupaten Tanggamus. Dengan membatasi ruang lingkup pada unsur-unsur tersebut, penelitian menjadi lebih terarah, memungkinkan pengumpulan data yang mendalam dari perspektif mereka yang terdampak langsung (Movitaria et al., 2024).

Alasan memilih fokus tersebut yaitu, Secara metodologis, (Movitaria et al., 2024) mengemukakan bahwa penetapan fokus penelitian sangat penting agar studi tetap terarah dan tidak melebar ke aspek-aspek yang kurang relevan. Fokus membantu menegaskan inklusi dan eksklusi data yakni hanya data yang relevan dengan fenomena yang diteliti yang dimasukkan, sementara yang di luar fokus diabaikan agar analisis tetap tajam. Jurnal pendidikan yang membahas infrastruktur dan pembelajaran menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana memiliki dampak besar terhadap efektivitas proses belajar. Contohnya pada penelitian oleh (Khoirunisa & Lestari, 2025) “Keterbatasan Infrastruktur dan Implikasinya terhadap Proses Pembelajaran di SMAN 15 Muaro Jambi”). Dengan memilih fokus pada persepsi, akses, keselamatan, dan kualitas layanan pendidikan dalam konteks kerusakan jembatan, penelitian ini

mampu menggali dampak nyata yang dirasakan oleh pelajar dan masyarakat lokal, sehingga hasilnya dapat direkomendasikan lebih spesifik bagi pemangku kepentingan lokal.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa titik jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan fokus khusus pada Jembatan Gantung Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Lokasi terpilih bukan hanya karena kerusakannya sudah cukup parah dan menjadi perhatian publik (viral di media sosial), tetapi juga karena fungsinya yang sangat vital sebagai jalur penghubung siswa ke sekolah, fasilitas publik, dan akses masyarakat sehari-hari.

Alasan utama memilih lokasi penelitian di Tampang Muda adalah keterkaitan langsung antara kerusakan infrastruktur (jembatan) dan dampaknya terhadap akses pendidikan dan keselamatan masyarakat. Di Tampang Muda, jembatan gantung yang rusak memaksa pelajar menyeberang dalam kondisi berisiko atau melakukan jalan memutar yang jauh untuk mencapai sekolah. Lokasi ini memiliki kelebihan sebagai studi kasus yang representatif: mereka memperlihatkan kondisi nyata di daerah pedesaan atau perbatasan desa yang infrastrukturnya kurang terlayani, sehingga hasil penelitian di sana akan memberikan gambaran yang kuat tentang kendala infrastruktur pendidikan di daerah luar kota besar. Lokasi-lokasi lain mungkin saja mengalami kondisi kerusakan, tetapi tidak sejelas atau seberapa kritis yang dialami di Tampang Muda misalnya tidak terpapar publik, tidak menjadi akses utama, atau sudah ditangani pemeliharannya sehingga penelitian di tempat lain bisa kurang relevan untuk menggambarkan skala masalah dan urgensinya.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan skunder:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan di dalam penelitian, yaitu dari pelajar, masyarakat lokal, dan pihak-terkait di lokasi penelitian (misalnya guru, pelajar, masyarakat dan tokoh masyarakat) melalui interaksi langsung (Sulung & Muspawi, 2024). Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pelajar yang melewati jembatan rusak, siswa, guru, masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menggali pengalaman, pandangan, dampak yang dirasakan, serta harapan mereka.
2. Observasi langsung di lapangan terhadap kondisi fisik jembatan, bagaimana cara pelajar dan masyarakat melewati jembatan tersebut, aksesibilitas jalan alternatif jika ada, dan tingkat risiko yang muncul.

3.4.2 Data Skunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan lewat media perantara seperti dokumen, laporan, publikasi, arsip, data statistik, dan literatur ilmiah. Penggunaan data sekunder sebagai pelengkap data primer memberikan konteks dan validasi tambahan. Data sekunder dapat berupa hasil penelitian sebelumnya, dokumen institusi, laporan yang relevan, arsip media dan lain-lain untuk memperkaya analisis dan memberikan latar belakang teoretis. Data sekunder diperoleh dari institusi/lembaga yang terkait serta dokumentasi yang sudah ada sebelumnya (Sulung & Muspawi, 2024). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi:

1. Dokumen pemerintah daerah (laporan infrastruktur, data sekolah, data pembangunan, perencanaan transportasi, catatan pemeliharaan jembatan).
2. Data sekolah (jumlah siswa, jarak tempuh ke sekolah, kondisi sarana pendukung).
3. Publikasi ilmiah dan jurnal terkait infrastruktur pendidikan, akses pedesaan, dampak kerusakan fasilitas publik terhadap pendidikan. Literatur buku dan laporan teknis yang membahas teori dan penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara infrastruktur dan pendidikan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu wawancara dan observasi:

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan percakapan langsung dengan informan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman, persepsi, motivasi, tindakan, perasaan, dan pandangan mereka terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna situasi atau pengalaman dari sudut pandang subjek secara fleksibel, termasuk pertanyaan terbuka yang bisa menyesuaikan arus percakapan agar aspek berbeda dari permasalahan muncul (Abrar, 2024).

Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan sebagai wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci dipilih berdasarkan kriteria tertentu:

1. Memiliki pengalaman langsung melewati jembatan rusak dalam aktivitas sekolah atau mobilitas sehari-hari,
2. Mengetahui dampak yang dirasakan fisik, psikologis atau waktu akibat kondisi jembatan rusak.
3. Bersedia berbicara jujur dan mampu berkomunikasi dengan baik.

Informan pendukung bisa berupa orang tua, guru, atau tokoh masyarakat yang memiliki wawasan tentang akses pendidikan dan kondisi infrastruktur lokal. Pemilihan ini menggunakan teknik purposive sampling (pengambilan informan berdasarkan pertimbangan khusus) agar data dari mereka yang paling relevan dengan fokus penelitian dapat diperoleh.

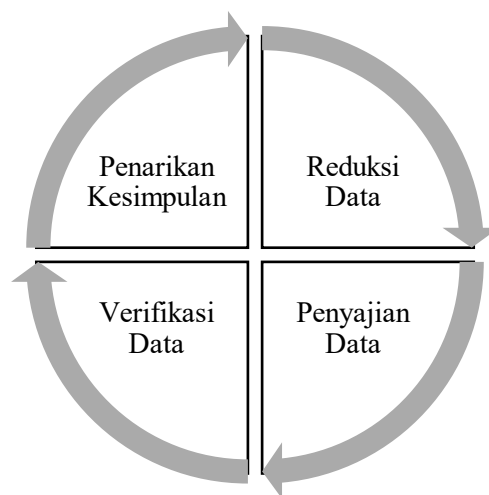
3.5.2 Observasi

Observasi adalah teknik di mana peneliti mengamati secara langsung lingkungan, objek, aktivitas atau interaksi di lapangan. Observasi ini bisa bersifat partisipatif atau nonpartisipatif, dan disertai catatan lapangan. Tujuannya adalah untuk menangkap perilaku nyata, kondisi fisik, dan konteks sosial yang mungkin tidak terungkap hanya lewat wawancara (Abrar, 2024).

Observasi di lapangan akan digunakan untuk melengkapi wawancara dengan melihat kondisi fisik jembatan, bagaimana pelajar/masyarakat melewati jembatan secara nyata, kondisi jalan alternatif jika ada, serta situasi saat jembatan rusak misalnya saat hujan, kerusakan yang tampak jelas, dan tindakan masyarakat sehari-hari terkait infrastruktur tersebut. Observasi akan dilakukan nonpartisipatif, artinya peneliti mengamati tanpa ikut langsung dalam aktivitas pengguna jembatan agar perilaku atau kondisi tidak terlalu dipengaruhi oleh kehadiran peneliti. Catatan lapangan (field notes) akan dibuat selama observasi, termasuk mendokumentasikan benda/fasilitas, waktu, pelaku, aktivitas serta interaksi atau hambatan yang terjadi. Peneliti juga akan memotret atau sketsa kondisi fisik jembatan sebagai bukti pendukung visual.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pengolahan data non-numerik (wawancara, observasi, dokumentasi) agar data tersebut menjadi bermakna, sistematis, dan bisa menjawab pertanyaan penelitian. Teknik analisis ini meliputi beberapa tahapan seperti reduksi data, penyajian data, verifikasi/triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Tahapan-tahapan ini bertujuan memudahkan penelitian dalam menemukan tema, pola, kategori, atau makna yang muncul dari data lapangan, bukan sekadar mendeskripsikan fakta secara permukaan (Rahmani et al., 2025). Beberapa teknik analisis data yang bisa digunakan antara lain:



Gambar. Teknik Analisis Data

3.6.1 Reduksi Data (Data Reduction)

Proses penyederhanaan dan pemfokusan data, mengeliminasi data yang tidak relevan, memusatkan perhatian pada hal yang penting dan sesuai fokus penelitian. Dengan reduksi, jumlah data yang banyak bisa dipilah agar analisis menjadi lebih terarah. Pada tahap awal, data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disaring, dan disederhanakan untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian, yakni persepsi pelajar, masyarakat, dan dampaknya terhadap akses dan kualitas pelayanan pendidikan. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan tema penelitian, seperti cerita

umum di luar konteks jembatan atau data yang berulang, dieliminasi. Proses ini membantu peneliti mengorganisasi data agar lebih fokus dan mudah dianalisis

3.6.2 Penyajian Data (Data Display / Data Presentation)

Data yang telah direduksi disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, bagan, serta kutipan langsung dari informan agar memberikan gambaran nyata tentang pengalaman mereka. Penyajian ini penting untuk memperlihatkan pola-pola yang muncul, hubungan antar kategori seperti dampak keselamatan, kehadiran di sekolah, dan persepsi terhadap pemerintah. Penyajian data yang baik memudahkan pembaca memahami konteks permasalahan dan membantu peneliti dalam menarik kesimpulan

3.6.3 Verifikasi / Validasi Data / Triangulasi

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari pelajar, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Triangulasi metode dilakukan dengan memadukan wawancara, observasi, dan dokumen resmi (misalnya laporan pemerintah daerah tentang kondisi jembatan). Selain itu, pengecekan ulang hasil wawancara kepada informan (member check) dilakukan agar interpretasi data sesuai dengan maksud informan. Langkah ini bertujuan meminimalkan bias dan memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan & Interpretasi

Kesimpulan ditarik setelah tema-tema yang relevan telah dianalisis dan divalidasi. Peneliti menginterpretasikan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: bagaimana persepsi pelajar dan masyarakat terhadap jembatan rusak serta dampaknya bagi akses dan kualitas pelayanan pendidikan. Interpretasi ini juga mengaitkan hasil penelitian dengan teori administrasi publik dan konsep pelayanan pendidikan di

daerah pedesaan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya deskriptif tetapi juga bermakna secara teoretis dan praktis

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data dan temuan penelitian ini dapat dipercaya dan valid, penelitian kualitatif menggunakan beberapa teknik keabsahan (trustworthiness) yang umum dalam literatur metodologi. Teknik keabsahan ini meliputi kredibilitas (credibility), transferabilitas (transferability), dependabilitas (dependability), dan konfirmabilitas (confirmability). Berdasarkan penelitian tentang persepsi masyarakat dan pelajar terhadap jembatan rusak, teknik-teknik ini akan diaplikasikan sebagai berikut:

3.7.1 Kredibilitas (Credibility)

Untuk meningkatkan kredibilitas, peneliti akan menggunakan beberapa strategi seperti triangulasi sumber dan metode, member checking, perpanjangan pengamatan, dan meningkatkan ketekunan (thick description). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari pelajar, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Triangulasi metode berarti mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumen untuk memeriksa konsistensi temuan. Member checking akan dilakukan dengan menyerahkan transkrip atau ringkasan temuan sementara kepada informan agar mereka dapat mengoreksi atau menambahkan pandangan mereka ini membantu memastikan bahwa interpretasi peneliti sejalan dengan maksud informan (member check). Perpanjangan pengamatan dan peningkatan ketekunan berarti peneliti berlama-lama di lapangan agar dapat memahami penelitiannya secara lebih dalam, serta terus mengecek ulang data dari waktu ke waktu agar tidak melewatkan data signifikan yang mungkin tersembunyi (Mekarisce).

3.7.2 Transferabilitas, Dependabilitas & Konfirmabilitas

Transferabilitas merupakan sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau dianggap relevan pada situasi atau konteks lain. Untuk itu, peneliti perlu menyajikan deskripsi latar kontekstual penelitian

secara rinci (setting, karakteristik informan, kondisi lokal) sehingga pembaca dapat menilai apakah hasil penelitian dapat “dipindahkan” ke konteks lain (transfer). Dependabilitas adalah konsistensi prosedur penelitian dari awal hingga akhir. Peneliti akan menyimpan catatan rinci mengenai proses pengumpulan data, perubahan pendekatan atau keputusan penelitian (audit trail), serta refleksi pribadi (refleksivitas) atas pengaruh subjektivitas peneliti agar prosesnya transparan bagi pihak lain. Konfirmabilitas berkaitan dengan objektivitas dan apakah temuan penelitian benar-benar berasal dari data, bukan dari bias peneliti. Untuk itu, peneliti akan mendokumentasikan jejak audit (audit trail), menyajikan kutipan langsung dari informan, dan bila memungkinkan meminta rekan sejawat atau ahli untuk memeriksa ulang (peer debriefing) proses interpretasi. Sehingga pembaca bisa melacak cara peneliti mencapai kesimpulan tersebut (transparansi).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Maksasar: Sustainability (Switzerland).
- Abrar, M. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*. Jambi: UNJA PUBLISHER.
- Afendi, A. R., Hudnah, Oktarina, H., Angkur, M. F. M., Yusup, M., Yuningsih, R. L., Sriharyati, S., Suwandi, Nuraeni, L., & Syukur, T. A. (2024). *Kesenjangan Pendidikan*.
- Agus, R., Nurul, R., Frilly, N. P., & Rendy, R. (2024). Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Peneltian Kualitatif Pendekatan Deskriptif. *Cendekia Pendidikan*, 5(5), 10–20.
- Fadillah, R., Desmaryani, R., & Lestari, A. (2025). Analisis Ketimpangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Daerah Pedesaan. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 3(2), 217–225.
- Haryati, E., Rosmiati, M., Mustofa, A., Chaidir, J., Djajasinga, N. D., Muda, L. S., Suacana, I. W. G., & Vanchapo, A. R. (2024). *Pengantar Pelayanan Publik*. CV Rey Media Grafika. Batam.
- Irawan, V. W. E. (2018). Urgensi Persepsi Peserta Didik Dalam Menilai Kompetensi Dosen. *Momentum : Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 7(2), 148–158.
- Juro, A., Sukma, F., Lubis, H., & Zahra, L. (2025). Dampak Infrastruktur Terhadap Pendidikan Di Perkampungan (Studi Kasus Di Desa Sugarang Bayu , Kecamatan Bandar , Kabupaten Simalungun) Dampak Infrastruktur Terhadap Pendidikan Di Perkampungan (Studi Kasus Di. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 6957–6964.
- Khoirunisa, & Lestari, A. (2025). Keterbatasan Infrastruktur Dan Implikasinya Terhadap Proses Pembelajaran Di Sman 15 Muaro. *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 79–89.
- Mahardhani, A. J. (2025). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Administrasi Publik Teori Dan Praktik* (Vol. 2). PT Media Penerbit Indonesia. Medan.

- Mastuti, R., Chalik, A., & Kurniawan, T. S. (2021). Dampak Pembangunan Jalan Desa Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 3(2), 112–120.
- Menezes, V. G. De, Pedrosa, G. V., Silva, M. P. P. Da, & Figueiredo, R. M. Da C. (2022). Evaluation Of Public Services Considering The Expectations Of Users A Systematic Literature Review. *Information (Switzerland)*, 13(4), 1–13.
- Movitaria, M. A., Amane, A. P. O., Munir, M., & Sari, Q. I. P. (2024). *Metodologi Penelitian*. Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka
- Nurbaya, Fikri, A., Salong, A., Rifai, M., Tati, A. D. R., Syukur, T. A., Zahro, I. M. F., Suhartono, & Dewi, A. E. R. (2024). *Pengantar Pendidikan*.
- Palguna, I. D. G., & Dwi Atmaja, B. K. (2023). Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 350–370.
- Pangestu, D. A., Harjanti, D. T., Anasi, P. T., & Apriliyana, M. I. (2025). The Impact Of Road Infrastructure In Pengkadan Baru Village On Students' School Interest In Sma Negeri 1 Kelam Permai. *Educasia: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran*, 10(1), 95–106.
- Pringgoutami, Z., Lisiswanti, R., & Oktaria, D. (2019). The Relation Between Student's Perception Of Learning Environment And Learning Motivation Of Pre-Clinical Medical Student. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia: The Indonesian Journal Of Medical Education*, 8(1), 10–16.
- Rahma, S. F., & Kartiasih, F. (2024). Pengaruh Infrastruktur Transportasi Serta Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Terhadap Ketimpangan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 153–170.
- Rahmani, D. A., Muhayati, S., & Kholis, I. (2025). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13037–13048.
- Rizal, Y. (2025). Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Kaitannya Dengan Reformasi Birokrasi Di Sumatera Barat. *Jakpp : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 1(1), 17–39.
- Rosyidah, S. A., H, I. W., Ismanafi, A. Z. Z., Putra, A., Khoirudin, S., & Soeprapto, W. P. (2024). Pentingnya Infrastruktur Jalan Bagi Aksesibilitas Ekonomi Dan Sosial Terhadap Warga Desa Sambongrejo Dan Desa Sendangagung Bojonegoro Wahjoe Poernomo Soeprapto 6. *Jurnal Media Akademik*, 2(10),

1–19.

- Said, A. (2022). Perceived Public Service Quality And Accessibility For Regional Index Development: The Case Of City Of Mojokerto-Indonesia. *Habitat*, 33(1), 44–54.
- Saprianto, R., Simbolon, T. R., & Hukom, A. (2023). Implikasi Otonomi Daerah Pada Pembangunan Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 3(2), 68–84.
- Shodiyevich, X. S. (2025). Psychological And Social Factors Influencing Adolescents' Perception Of Physical Activity. *Jurnal Psikologi*, 2(3), 1–7.
- Sitepu, H. S. D., Kusmanto, H., & Amin, M. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Sei Bingei. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 6(4), 136–140.
- Suharta, I. M. (2021). Road Infrastructure Inequality And Dropout Ratesin Isolated Areas: Tracking The Indonesianliterature. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2898–2907.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*, 5(3), 110–116.
- Susanti, P. D., & Sabardila, A. (2023). Pembangunan Jalan Dan Jembatan Penghubung Akibat Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo Dan Karang Sari. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 5(1), 57–71.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 13–23.
- Wulandari, S., & Tulis, R. S. (2022). Prinsip Manajemen Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Katingan (Studi Di Desa Tumbang Lahang) Jurnal Administrasi Publik (Jap). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 8(2), 148–161.